



Menuju Jateng Satu



Kampanye Terbuka Tak Relevan Lagi

SEMARANG - Tahapan masa kampanye pemilihan gubernur (Pilgub) sudah berlangsung sejak 15 Februari lalu. Masing-masing kandidat sudah mulai sosialisasi dan kampanye informal dengan mengunjungi daerah basis pendukung.

Berbagai program kerja juga mulai dipaparkan calon, baik Ganjar Pranowo-Taj Yasin maupun Sudirman Said-Ida Fauziyah.

Sejauh ini, bentuk kampanye di ruang publik belum mereka lakukan. Sebagian kalangan berpendapat, bentuk kampanye tersebut dinilai sudah tak relevan pada era perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini.

Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Dr Turnomo Rahardjo mengatakan, kampanye terbuka cenderung identik dengan hiburan. Masyarakat yang berniat datang merasa lebih tertarik dengan tontonan yang disuguhkan dibanding orasi kandidat atau calon.

"Kalau dari perspektif komunikasi, kampanye di panggung terbuka sudah tidak efektif lagi. Bentuk kampanye itu sebenarnya yang lebih menarik bukan orasi dari calon atau kandidat, melainkan tontonannya," kata Turnomo, Minggu (18/3).

Senada dengan Turnomo, pengamat politik dari Undip Yuwanto PhD menilai, jika orientasi kampanye terbuka untuk memaparkan visi misi

kandidat, maka hal itu dianggap tidak relevan. Sebaliknya, bentuk kampanye dipandang masih relevan bila ditujukan pada masyarakat yang membutuhkan hiburan.

Unsur Hiburan

Kampanye terbuka atau yang menggunakan ruang publik diakuinya tidak lepas dari unsur hiburan. Karena itu, sasaran massa yang berpartisipasi dalam kampanye itu cenderung masyarakat menengah bawah.

Sementara itu, Yayasan Tasamuh Indonesia Mengabdi (Time) menggelar survei tentang politik uang dalam pemilu atau pilkada. Hasilnya cukup mengejutkan. Mayoritas masyarakat Jawa Tengah memiliki persepsi bahwa politik uang dalam pilkada adalah hal yang wajar.

Penanggung jawab survey M Saekan menyatakan, survei dilakukan terhadap 255 responden yang dilakukan secara acak (random). Pertanyaan dikirim lewat nomor ponsel melalui aplikasi WA dan Line pada Desember 2017. Hasilnya, 64% persen responden menyatakan politik uang hal yang wajar, sedangkan 36% menolak.

"Dilihat dari perspektif sosial, dengan hasil survei ini dapat dikatakan bahwa di tengah masyarakat telah terjadi penyimpangan. Di satu sisi bangsa Indonesia sedang giat memberantas korupsi, tetapi di sisi lain masyarakat masih memiliki persepsi bahwa politik uang dalam pemilu sesuatu hal yang wajar," paparnya di Semarang, kemarin.

Menurutnya, ada tiga faktor yang menyebabkan kemerebakan praktik politik uang. Pertama faktor ekonomi, kedua ketidak-tahuan atau ketidakpahaman masyarakat terhadap makna atau manfaat pemilu bagi kehidupan sosial. Faktor ketiga adalah budaya. (ftp,G2-50)